

IMPLEMENTASI SISTEM EKONOMI PANCASILA DALAM KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA

Implementation of the Pancasila Economic System in Indonesian Government Policies

Kenlies Era Rosalina Marsudi¹, Verbena Ayuningsih Purbasari²

^{1,2}**Institut Agama Islam Negeri Ponorogo; Indonesia**

Email: Marsudikenlies@gmail.com



© 2022 by the Authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

Abstrak

Ekonomi Pancasila merupakan sebuah konsep pemikiran mengenai perencanaan dan pelaksanaan perekonomian tingkat nasional dengan kerangka pikir yang berlandaskan penjabaran nilai-nilai yang ada dalam paradigma Pancasila. Implementasi konsep ekonomi Pancasila sendiri menjadi sesuatu yang krusial melihat fenomena kapitalisme global ditambah lagi dengan adanya pandemi virus Covid-19 yang mengakibatkan stabilitas ekonomi terus menurun. Penurunan stabilitas perekonomian di Indonesia saat ini semakin menunjukkan bahwa implementasi ekonomi Pancasila sendiri telah melenceng dan tergeser oleh keberadaan sistem perekonomian liberalis kapital yang akhirnya menyebabkan terjadinya ketimpangan perekonomian masyarakat. Tujuan dari penelitian ini menganalisis eksistensi dari implementasi ekonomi Pancasila pada berbagai kebijakan pemerintah dalam menghadapi gempuran liberalis kapital global. Metode penelitian menggunakan studi literatur, dengan memaparkan teori yang berhubungan dengan judul yang diperoleh dari buku, jurnal dan media online. Penelitian ini menemukan bahwasannya implementasi ekonomi Pancasila dalam berbagai kebijakan pemerintah masih terlihat semu. Bangsa Indonesia telah sekian lama dihadapkan globalisasi dan liberalisasi ekonomi sebagai sebuah tantangan nyata dalam mempertahankan ekonomi kerakyatan sebagai sebuah kearifan lokal bangsa tanpa harus tertinggal oleh perkembangan dan kemajuan dunia. Keadaan ini merupakan sebuah pekerjaan rumah yang sangat urgen bagi pelaku ekonomi, masyarakat dan terutama pemerintah untuk menggagas peraturan dan kebijakan ekonomi Indonesia yang harus tetap mengedepankan ekonomi kerakyatan Pancasila. Sistem perekonomian kerakyatan menjadi solusi yang patut dan sesuai diterapkan di Indonesia yang bersandarkan pada Pancasila.

Kata Kunci: Pancasila; Ekonomi Pancasila; Kebijakan Ekonomi; Kapitalisme Global

Abstract

Pancasila economic system is a concept of thinking about the planning and implementation of the national economy with a framework based on the elaboration of the values that exist in the Pancasila paradigm. The implementation of the Pancasila economic system is crucial in view of the phenomenon of global capitalism and the COVID-19 pandemic which has resulted in decreased economic stability. The decline in economic stability in Indonesia today increasingly shows that the implementation of the Pancasila economy has deviated and is displaced by the existence of a capital-liberal economic system which has ultimately led to inequality in the people's economy. The purpose of this study is to analyze the existence of the economic implementation of Pancasila in various government policies in facing the onslaught of global capital liberalism. The research method uses literature studies, by presenting theories related to titles obtained from books, journals and online media. This research finds that the implementation of the Pancasila economic system in various government policies is still apparent. This nation has been faced with globalization and economic modernization as serious challenges in maintaining the wisdom of the nation's economic culture without having to be left behind from these world phenomena. This has become a very hard homework for the government structure in initiating Indonesian economic regulations and policies that must prioritize the people's economy. The populist economic system is a suitable solution to be applied in Indonesia which relies on Pancasila.

Keywords: Pancasila; Pancasila Economics; Economic Policy; Global Capitalism

PENDAHULUAN

Setiap negara tentu memiliki sebuah landasan hukum untuk memastikan bahwa negara yang dibentuk dapat berjalan dengan baik dan stabil dalam jangka waktu yang lama, tak terkecuali negara kita Indonesia. Memiliki dasar negara sebagai pandangan hidup dan sebagai pedoman dalam menjalankan setiap langkah pemerintahan sejatinya dilakukan untuk menjamin tercapainya tujuan negara yang sejak awal mula berdiri telah dideskripsikan secara terperinci dalam konstitusi yang telah disepakati. Peran negara yang selanjutnya dilaksanakan oleh pemerintah menjadi sesuatu yang sangat menentukan keberhasilan tujuan negara itu sendiri.

Susunan pemerintah telah terstruktur dan terperinci sesuai tupoksi untuk menangani berbagai lini kehidupan yang ada dalam masyarakat, salahsatu lini utama yang menjadi tolak ukur keberhasilan suatu negara ialah sektor perekonomiannya. Terkait bidang perekonomian tentu sudah termaktub dalam konstitusi UUD Negara republik Indonesia tahun 1945 yang memuat sistem ekonomi, arah dan orientasi ekonomi suatu bangsa.

Ekonomi yang diterapkan di Indonesia harusnya menerapkan sistem perekonomian khas bangsa Indonesia yakni

sistem perekonomian Pancasila. Hal ini merupakan konsekuensi yangmana secara normatif Pancasila serta UUD 1945 merupakan landasan idiil perekonomian Indonesia.dasar hukum dari perekonomian sebenarnya telah diatur dalam UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai sebuah usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan UUD 1945 Pasal 33 Ayat 4 yang berbunyi perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (Yustika, 2014).

Bagaimana berjalannya sistem ekonomi dalam sebuah negara pasti dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal yang dapat ditemui biasanya ialah dari keadaan fisik, lokasi geografi, jumlah serta bagaimana kualitas dari sumber daya alam dan juga bagaimana sumber daya manusianya. Sedangkan untuk faktor eksternalnya diantaranya ialah keadaan keamanan global, perekonomian dan politik dunia serta perkembangan teknologi dan informasi (Salim, 2019). Masuknya era globalisasi menjadikan bangsa-bangsa

didunia hampir tidak memiliki batas. Globalisasi sendiri memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Saat ini dampak tersebut sudah masuk dan dirasakan apalagi jika berkaitan dengan perekonomian, masuknya globalisasi tentu akan diikuti adanya paham kapitalis yang sangat individualis dan menjunjung asas keuntungan semata (Hosein, 2016). Saat ini globalisasi yang direkayasa negara-negara besar akan memberikan dampak bagi negara-negara yang sedang berkembang, dalam ranah prinsip ideologi dihembuskan nilai-nilai individualisme dan neoliberalisme yang mengutamakan kebebasan dan kepentingan individu daripada kepentingan Bersama atau bangsa dan negara. Pada ranah politik digunakan untuk untuk gerakan damai penyelenggaraan konferensi politik, agresi dan diplomasi tetapi dibalik itu semua justru digunakan untuk memanipulasi dan menguasai negara-negara berkembang secara ekonomi dalam bentuk baru yakni neoimperialisme atau penjajahan terselubung dalam perekonomian.

Dewasa ini yang sedang terjadi di tengah-tengah kita ialah adanya neoliberalisme atau disebut juga neokapitalisme dalam bidang ekonomi. Ciri utama dari neoliberalisme ini ialah adanya pergerakan yang secara bebas tanpa batasan global dengan melalui pasar bebas dan

perdagangan bebas lintas negara, yang seringkali terjadi ialah negara-negara maju akan memanfaatkan dan mengalahkan negara berkembang. Cara yang seringkali digunakan oleh negara maju untuk mengelabui negara berkembang ialah dengan memberikan modal pada negara-negara berkembang dan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Hal ini mengakibatkan diambil alihnya kekayaan dan berbagai sumber daya alam negara berkembang oleh negara-negara maju. Revolusi industri dan globalisasi serta pasar bebas ditambah lagi dengan masuknya liberalisme, komunisme, individualisme, atheisme, kapitalisme, narkoba, terorisme, dan korupsi serta kebudayaan global dalam kehidupan social masyarakat Indonesia saat ini menjadi sebuah tantangan bagi eksistensi ideologi Pancasila, terutama sebagai pondasi perekonomian bangsa (Fadilah, 2019).

Demi kelangsungan eksistensi Pancasila pada kehidupan negara dan bangsa Indonesia di era globalisasi, mengharuskan kita untuk lebih mendalami dan mempraktikkan kembali nilai-nilai Pancasila secara mendalam pada berbagai lini kehidupan, tak terkecuali dalam bidang perekonomian. Hal ini menarik untuk dikaji bersama yang berlandaskan pada dasar negara kita Pancasila yang memiliki asas kekeluargaan dan gotong royong, agar

generasi penerus bangsa tetap dapat mengenali jatidiri sebagai manusia Indonesia dan secara langsung dapat menghayati dan mengamalkannya, serta intisari nilai-nilai yang luhur itu tetap terjaga sebagai pedoman bangsa Indonesia sepanjang masa. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia harus senantiasa kita jaga dan sebagai pembimbing interaksi antar individu dan kelompok yang ada. Namun pada kenyataannya nilai-nilai Pancasila cenderung ditinggalkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini. Sebagai dampak masuknya nilai-nilai global dari berbagai penjuru dunia kini mengancam eksistensi Pancasila karena adanya kebebasan yang kebablasan. Eksistensi Pancasila ini akan terancam keberadaannya apabila dasar negara tersebut serta penjabarannya yang ada dalam konstitusi tidak dipergunakan sebagai dasar ukuran serta acuan dalam berpikir, mengambil kebijakan dan berperilaku sebagai seorang warga negara, sementara dilain sisi gempuran nilai-nilai global terus mendera bangsa kita (Kurniawan & Lahir, 2017). Ekonomi Kerakyatan atau ekonomi Pancasila ini merupakan sebuah sistem perekonomian yang orientasinya mendorong keterlibatan dari berbagai pihak dalam aktivitas kegiatan ekonomi yang mengacu pada falsafah Pancasila dengan

mengedepankan nilai moralitas, keadilan, manusiawi, gotong royong, Kerjasama yang baik serta keadilan sosial. Hal ini merupakan penjabaran dari sila-sila Pancasila dari sila pertama hingga sila kelima.

Ajaran utama ekonomi Pancasila bahwa dalam berekonomi semata-mata tidak hanya bermotif mengutamakan dan memaksimalkan keuntungan (*profit*) dan kepuasan (*utility*) ekonomi, akan tetapi lebih pada aspek kekeluargaan. Kenyataan yang ada, pemerintah dalam praktiknya secara fisik lebih mementingkan kaum berduit atau konglomerat, karena para konglomerat lebih dekat dengan negara dan mereka lebih banyak membayar pajak serta tidak dapat dipungkiri untuk menduduki jabatan dalam suatu lembaga peran mereka sangat besar. Pada prakteknya sistem kerakyatan tidak bisa mensejahterakan rakyat itu sendiri. Mubyarto (2002: 37) berpendapat bahwa system perekonomian haruslah berpihak pada masyarakat luas, sementara sistem ekonomi yang ada hanya melayani perusahaan besar. Berdasarkan hal tersebut tujuan dari penelitian ini menganalisis bagaimana eksistensi dari implementasi ekonomi kerakyatan sebagai sub sistem perekonomian yang berdasar Pancasila menghadapi gempuran kapitalisme global dalam setiap kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah.

METODE PENELITIAN

Metode yang penulis menggunakan dalam penelitian ekonomi Pancasila ini yaitu riset kepustakaan (*library research*) dengan model analisis induktif. Sumber data sekaligus bahan-bahan yang penulis perlukan untuk melakukan dan menulis hasil penelitian ini berasal dari buku, ensklopedia, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya (Harahap, 2014: 68). Riset kepustakaan ini dengan memanfaatkan berbagai sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian yang valid dan relevan tanpa memerlukan riset langsung lapangan (Zed, 2008). Studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, karena penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah. Penelitian yang telah penulis kerjakan ini dilakukan dengan mengkaji berbagai tulisan cendekiawan dan juga hasil penelitian yang terkait dengan sistem perekonomian Indonesia yakni ekonomi Pancasila, serta melihat fenomena dilapangan melalui berbagai media massa online mengenai perkembangan serta penerapan sistem ekonomi Pancasila dalam berbagai kebijakan pemerintah Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekonomi Pancasila yang dimaksud oleh penulis disini merupakan sebuah sistem ekonomi yang bersumber atau berlandaskan pada nilai-nilai dan asas-asas pada ideologi serta dasar negara Indonesia yakni Pancasila. Asas yang paling menonjol dalam sistem ekonomi Pancasila ini ialah asas moralitas, keadilan, kekeluargaan dan gotong royong nasional. Sistem ini memberikan kebebasan namun juga tetap memberikan rambu-rambu pedoman kepada para pelaku ekonomi baik dari pemerintah, masyarakat maupun pihak swasta dalam melakukan praktik kegiatan perekonomian di kehidupan sehari-hari. Lalu yang seperti apa implementasi sistem ekonomi Pancasila agar penerapannya dalam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak hanya menguntungkan secara pribadi atau pihak-pihak tertentu, namun juga berkontribusi pada seluruh masyarakat?

Potret implementasi dari konsep ekonomi Pancasila ini mulai menjadi pertanyaan banyak pihak ketika dampak pada bidang perekonomian mulai sangat dirasakan oleh banyak kalangan saat pandemi Covid-19 melanda. Pasalnya sejak dilanda pandemi global ini, banyak sekali masyarakat yang merasakan kerugian ekonomi karena terkendala oleh berbagai masalah dan keterbatasan ruang gerak. Dari sini keberadaan praktik ekonomi Pancasila

mulai dipertanyakan kembali. Sistem ekonomi yang ada di dunia terdapat banyak macamnya, namun ada dua konsep sistem ekonomi yang banyak digunakan oleh negara-negara di dunia yakni sistem ekonomi liberal dan juga sistem ekonomi komunis, sistem ekonomi tersebut masing-masing menyesuaikan dengan ideologi apa yang diusung oleh negaranya. Sistem ekonomi liberal mengutamakan kebebasan individu dan kebebasan pasar dalam aktivitas ekonomi negaranya. Sedangkan pada sistem ekonomi komunis, negara atau pemerintah memegang seluruh kontrol dalam segala aktivitas dan kegiatan ekonomi negaranya secara otoriter atau monopolistik. Disamping kedua ideologi tersebut, terdapat ideologi lain-lain lagi pada beberapa negara, seperti di Inggris dan Jerman yang menerapkan sistem ekonomi campuran (Kuncoro, 2001).

Indonesia memiliki Pancasila sebagai ideologi negara, secara otomatis seharusnya dalam sistem perekonomiannya menerapkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi ini harus berlandaskan lima sila Pancasila yang cenderung kekeluargaan dan adil pada seluruh masyarakat. Perbedaan mencolok sistem ini dengan kapitalisme ialah apabila sistem kapitalisme cenderung mengabsahkan kesenjangan dan penindasan terhadap masyarakat yang lemah, eksploitasi dan

juga individualisme, maka jika pada ekonomi Pancasila menghindarkan pada terjadinya penindasan dan eksploitasi, karena semua berasaskan pada asas kekeluargaan. Semua yang bersifat kekeluargaan ini telah diatur sebagaimana rupa seperti pada pasal 33 UUD NRI 1945.

Sistem ekonomi Pancasila juga mengupayakan negara kita sebagai negara yang berdikari atau berdiri diatas kaki sendiri, sehingga negara kita tidak bergantung pada asing. Kerjasama dengan negara lain boleh-boleh saja dilakukan, tetapi negara kita tidak boleh lemah, juga harus memiliki kekuatan agar tidak dirugikan dan tidak merugikan yang lain. Kerjasama yang dilakukan harus menguntungkan kedua belah pihak. Penjabaran daripada nilai-nilai Pancasila ada pada konstitusi negara kita yakni UUD NRI 1945, maka pasal-pasal yang terdapat dalam konstitusi harus selalu menjadi acuan dalam setiap langkah mengambil kebijakan oleh pemerintah. Selain sebagai pertimbangan saat mengambil kebijakan ekonomi, konstitusi juga digunakan sebagai acuan implementasi kebijakan tersebut dilapangan dan juga sebagai pengukur saat dilakukan evaluasi terhadap kebijakan yang diambil. Pancasila dan konstitusi yang sangat sesuai dengan kepribadian bangsa dengan berbagai tujuan dan cita-cita yang telah termaktub didalamnya tentu sangat

mampu dijadikan sebagai pisau analisis untuk mengukur ketajaman kebijakan ekonomi yang akan diputuskan (Baswir, 2009).

Namun dalam kenyataan dilapangan implementasi dari sistem ekonomi Pancasila ini dalam berbagai kebijakan publik yang menyangkut tentang kebijakan tentang perekonomian masih mengalami berbagai kendala dan hambatan. Kendala yang muncul diantaranya ialah kendala yang berasal dari internal yakni dari si pembuat kebijakan itu sendiri, seringkali fenomena saat ini para pembuat kebijakan yang seharusnya melakukan tugasnya untuk tujuan mensejahterakan seluruh masyarakat justru disusupi oleh kepentingan-kepentingan kelompok maupun individu, sehingga kebijakan yang diambil tidak murni berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kebijakan perekonomian yang dipenuhi dengan unsur kepentingan suatu kelompok tertentu tersebut sudah pasti hanya menguntungkan segelintir orang saja dan justru merugikan masyarakat luas. Selain itu banyak pula para pembuat kebijakan yang saat ini sudah terkontaminasi dengan paham-paham kapitalisme liberal sehingga sangat mempengaruhi kebijakan yang akan diambil. Kendala-kendala tersebut akhirnya menghambat internalisasi Pancasila dalam kebijakan ekonomi

sehingga membutuhkan sebuah solusi agar permasalahan dapat segera terselesaikan. Solusi yang dapat diambil ialah dengan memberikan refleksi atau pencerahan pada para pembuat kebijakan tersebut, selain pembuat kebijakan para penyelenggara negara dan para elit politik juga sangat perlu untuk diberikan pencerahan ini, pencerahan dapat melalui semacam pelatihan dasar atau diklat, sehingga dapat benar-benar dipahami dan nantinya diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Namun saat ini juga banyak kita jumpai orang-orang yang mulai peduli dengan implementasi nilai-nilai Pancasila. Hal ini dapat kita lihat dari munculnya berbagai lembaga untuk melestarikan Pancasila seperti Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), badan ini merupakan sebuah angin segar yang kedepannya memiliki tugas dan peran besar dalam mengontrol kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh para pembuat kebijakan agar tetap berada dalam koridor nilai-nilai Pancasila. Munculnya berbagai lembaga yang bertujuan untuk melestarikan Pancasila dalam kehidupan ini tidak terlepas dari keadaan saat ini yangmana telah terjadi regradasi implementasi Pancasila dalam kehidupan negara dan bangsa. Salah satu yang terlihat nyata dari menurunnya nilai-nilai Pancasila dalam

masyarakat ialah sudah langkanya kegiatan gorong-royong yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia, yang kini justru meningkat ialah keinginan materialisme yang akhirnya menjadikan masyarakat kita menjadi orang-orang yang individual kurang peduli dengan lingkungan sekitar dan hanya mementingkan kepentingan pribadi saja. Bergesernya kebiasaan hidup masyarakat Indonesia yang menjadi individual ini tidak lain merupakan dampak dari gelombang globalisasi.

Atmosfer globalisasi dengan segala dampak positif dan negatifnya sangat terasa dalam kehidupan bangsa Indonesia saat ini. Globalisasi yang menganut paham pasar bebas ini akan memiliki banyak dampak negatif bagi masyarakat Indonesia apabila para produsen lokal tidak memiliki daya saing yang kuat dengan produsen global. Adanya pasar bebas ini tentu akan mempengaruhi perkembangan para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) karena jangkauan yang dimiliki dalam lingkup yang kecil dan modal yang terbatas, untuk itulah UKM sangat perlu perlindungan atau proteksi dari pemerintah agar tetap mampu bersaing dalam menghadapi situasi pasar bebas saat ini. Perlindungan yang diberikan ini bukan berarti kualitas dari produsen kita kurang bagus, tetapi memang harus terlihat bukti nyata upaya dari pemerintah untuk memberikan proteksi produk dalam negeri

kita. Jangan sampai dengan adanya pasar bebas ini dan kurangnya persiapan dari negara kita akhirnya membuat kita tidak bisa bersaing dengan produk-produk asing. Kendala yang sering dihadapi oleh para pelaku usaha ialah terkait dengan modal, jangkauan pasar yang masih terbatas, teknologi yang digunakan belum efisien dan manajemen usaha yang belum efektif serta belum efisien. melihat berbagai kendala diatas maka akan memiliki dampak resiko kegagalan yang cukup tinggi.

Tingginya angka resiko kegagalan akhirnya mengakibatkan resiko investasi juga besar. Tingginya resiko investasi dan dengan rendahnya kepemilikan Collateral akhirnya menyebabkan lembaga keuangan kurang berminat untuk memberikan bantuan pada UKM. Kekurangan pasokan bantuan keuangan ini akhirnya nmemberikan kesempatan kepada berbagai Lembaga kredit non bank seperti koperasi simpan pinjam (KOSIPA), pengijon dan berbagai Lembaga swasta lain menjadi pilihan terakhir oleh para pelaku UKM walaupun dengan nilai bunga yang sangat tinggi jauh diatas nilai bunga pasar. Intervensi pemerintah terkait keadaan ini perlu diwujudkan secara nyata, bukan hanya sekedar memberikan bantuan uang tunai langsung kepada para pelaku usaha tersebut, karena dengan adanya bantuan langsung secara terus menerus akan

mengakibatkan pelaku usaha kecil tersebut akhirnya terbiasa bergantung kepada bantuan tunai dari pemerintah dan kurang mau berusaha sendiri terhadap keberlangsungan hidup usahanya. Untuk itulah sangat diperlukan kebijakan ekonomi yang lebih berpihak kepada masyarakat luas, masyarakat pelaku usaha kecil dan menengah. Untuk itulah sangat perlu diimplementasikannya nilai-nilai Pancasila terhadap kebijakan ekonomi. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan ekonomi menurut Mubyarto dapat dijabarkan dan dianalisis sesuai dengan kondisi nyata dilapangan saat ini sebagai berikut:

1) Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Roda perekonomian berjalan berdasarkan oleh rangsangan ekonomi dan moralitas. Sila pertama Pancasila kiranya jelas merupakan dasar dari landasan moral dan perilaku manusia Indonesia dalam menjalankan roda perekonomian, meskipun terkadang dalam prakteknya banyak pengusaha, pedagang, konsumen dan seluruh pelaku perekonomian yang lain lebih mengendepankan untung rugi pribadi, mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa menggunakan moralitas dalam kegiatan ekonominya. Diharapkan kebijakan yang diambil oleh pemerintah menyertakan sila ketuhanan Yang Maha Esa yaitu menggunakan

landasan moral serta sifat-sifat sistem moral ekonomi Indonesia untuk digunakan sebagai pedoman kegiatan perekonomian oleh seluruh perilaku ekonomi dalam berbagai tingkatan sistem perekonomian baik di tingkat makro maupun mikro. Tujuannya ialah supaya tercipta kegiatan perekonomian yang jujur dan bermoral, selain memikirkan keuntungan yang didapatkan pribadi juga memikirkan bagaimana supaya terjadinya transaksi yang adil bagi diri sendiri maupun pelaku ekonomi yang lain, sama-sama diuntungkan tidak merugikan pihak yang lain. Selain itu supaya terbangun perekonomian tanpa adanya diskriminasi antara pemilik modal besar dengan modal kecil dan menghindari diskriminasi dalam sisi yang lain juga seperti dalam hal suku, ras, agama dan antar golongan yang lain. Untuk menciptakan gotong royong serta bertaqwa Kepada Tuhan YME, pemerintah Indonesia harus jadi pelopor kebijakan yang Pancasilais dan menunjukkan keberpihakkannya pada pelaku usaha kecil dengan cara memberikan prioritas kebijakan ekonomi kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Saat ini pemerintah telah beberapa kali membuat kebijakan terkait pelaku perekonomian kecil dan

menengah ini yang seringkali disebut dengan UMKM, kebijakan nyata lain yang telah diambil pemerintah dalam hal ini dengan adanya kementerian khusus yang membidangi persoalan UMKM ini yaitu Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, merupakan kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah.

- 2) Nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Pada sila kedua ini makna yang dapat kita simpulkan ialah keinginan untuk mewujudkan pemerataan sosial (egalitarian) sesuai asas-asas kemanusiaan yang tentunya adil dan manusiawi atau beradab. Semangat untuk memanusiakan sesama manusia tanpa memandang latar belakangnya dari sisi suku, ras, agama dan budaya akan menjadi bibit terciptanya semangat berbangsa dan bernegara yang penuh dengan rasa kekeluargaan, toleransi dan tenggang rasa, kemudian apabila telah menjadi kebiasaan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari akan menjelma menjadi semangat solidaritas menuju kesejahteraan dan pemerataan ekonomi di Indonesia. Demikian merupakan sebuah manifestasi daripada implementasi sila kedua Pancasila. Berdasarkan pengalaman, semangat

solidaritas akan menebal dalam keadaan susah dan prihatin, dan sebaliknya cenderung menipis dalam serba kemakmuran. Tetapi dalam hal ini pun banyak perkecualian, karena adanya kecenderungan kuat berkembangnya rasa sosial dan peningkatan kegiatan kemanusiaan pada saat seseorang mencapai sukses dalam bidang usaha. Sifat-sifat kedermawanan ini memang selalu terlihat berkembang bila orang menjadi semakin kaya, lebih-lebih bagi mereka yang taat beragama, karena ini sesuai pula dengan ajaran-ajaran beragama. Dalam pelaksanaan program kebijakan proteksi usaha kecil misalnya masyarakat pelaku usaha kecil harus menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah, agar terjadi jaring aspirasi sehingga perumusan kebijakan akan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha kecil. Pemerataan sosial dalam bidang ekonomi di Indonesia terlihat dari adanya kluster industri pada UKM yang akhirnya membentuk Koperasi sebagai bagian dari usaha bersama, ini relevan dengan point koperasi sebagai soko guru perekonomian. Meskipun adanya koperasi ini masih inisiatif dari para pelaku usaha itu sendiri bukan dari pemerintah, akhirnya pemerintah pun

bersedia memberikan stimulasi kepada koperasi para pelaku usaha ini.

3) Persatuan Indonesia. Prioritas kebijaksanaan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang tangguh. Ini berarti nasionalisme menjiwai setiap kebijakan ekonomi. Semangat nasionalisme di bidang ekonomi selalu menjiwai bangsa Indonesia. Apabila terlihat menyurut semangat ini, disebabkan oleh unsur-unsur keterpaksaan karena semakin ketatnya persaingan internasional. Kita harus bisa menganalisis setiap kasus kebijakan ekonomi yang hendak diambil oleh pemerintah, apakah akan menyumbang atau tidak pada peningkatan ketangguhan atau ketahanan ekonomi nasional. Misalnya secara lebih spesifik, setiap utang baru atau kerjasama ekonomi dengan negara lain bisa menyumbang atau malah sebaliknya mengancam ketangguhan dan ketahanan ekonomi nasional. Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dapat dirasakan dalam bentuk yang positif berupa dukungan

ataupun wujud yang negatif berupa penolakan. Namun belum adanya kebijakan proteksi terhadap usaha kecil menengah di Indonesia mau tidak mau harus secepatnya di rumuskan, agar para pelaku usaha kecil dapat dengan nyaman menjalankan usahanya karena sudah ada regulasi yang memberikan kelonggaran kepada mereka untuk berusaha.

4) Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Koperasi merupakan soko guru perekonomian dan merupakan bentuk paling konkret dari usaha bersama. Dalam melaksanakan sistem ekonomi usaha bersama berdasar asas kekeluargaan, kita mengenal tiga pelaku utamanya yaitu koperasi, usaha negara dan usaha swasta. Dari segi pandangan disiplin nasional yang harus atau wajib dipatuhi, kita bisa menyatakan bahwa masing-masing pelaku ekonomi tersebut mempunyai etika kerja sendiri-sendiri yang berbeda satu sama lain. Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang berwatak sosial merupakan organisasi atau perkumpulan orang bukan perkumpulan modal yang dibentuk oleh para anggotanya untuk melayani kepentingan mereka, yaitu membantu memperjuangkan kepentingan mereka, khususnya dalam upaya meningkatkan

kesejahteraannya. Ini berarti misi dari koperasi adalah pelayanan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin kepada anggota. Maka ukuran paling mendasar untuk menilai berhasil tidaknya koperasi adalah manfaat pelayanan kepada anggota. Seperti yang dijelaskan diatas, adanya inisiatif dari para pelaku usaha dari beberapa klaster industri di Indonesia yang telah sadar secara bersama-sama bersepakat untuk membuat koperasi sebagai wadah permodalan bagi rumpun usaha yang mereka geluti.

5) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Adanya imbalan yang jelas dan tegas antara perencanaan di tingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kebijaksanaan ekonomi untuk mencapai keadilan ekonomi dan keadilan sosial. Keadilan sosial atau *social justice* merupakan masalah yang sudah lama menjadi perhatian para pemikir, khususnya filosof. Bangsa Indonesia mencantumkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagai tujuan akhir yang digambarkan sebagai masyarakat yang adil dan makmur, yang gemah ripah karta raharja, karena wujud akhir dari masyarakat bangsa yang dituju, jelas dimaksudkan sebagai masyarakat yang mengandung sifat-sifat keadilan dan kemakmuran yang

lengkap, yang mencakup keadilan hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, dan moral. Secara singkat, masyarakat adil dan makmur yang dituju adalah masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila, yaitu masyarakat idaman yang secara lengkap dan utuh didasarkan pada kelima sila dalam Pancasila dan muaranya pada sila yang kelima yaitu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh diwujudkan melalui realisasi prinsip keadilan dalam tiap-tiap aspek keadilan, yaitu hukum, ekonomi politik, sosial budaya, dan moral yang semuanya berkaitan erat. Aspek keadilan sosial memang menjadi dambaan masyarakat Indonesia, khususnya di bidang pertanian dan perdagangan. Betapa tidak ada beberapa kasus yang membuat para pelaku usaha dibidang pertanian begitu dilematis, seperti harga pupuk yang semakin tinggi, berbagai macam hama dan penyakit tanaman yang semakin bervariasi serta nilai jual hasil pertanian yang murah. Seolah ekonomi Pancasila itu runtuh oleh segelintir orang bermodal besar, sehingga Koperasi Unit Desanya tidak bisa beroperasi lagi lantaran gedungnya disewa oleh salah satu ritel ternama. Kemudian hasil pertanian para petani yang seharusnya bisa dijual di

KUD dan bisa meminjam sedikit permodalan dari KUD tidak bisa, sehingga mereka mengandalkan pinjaman permodalan pada *rente* atau bank *titil*, yang sudah barang tentu sangat besar bunganya. Kemudian masih belum optimalnya pengelolaan sumber daya alam yang ada di Indonesia, keterbatasan sumber daya manusia menjadi salahsatu faktor utama yang mempengaruhi baik buruknya pengelolaan sumber daya alam, untuk itu investasi pemerintah dan masyarakat dalam bidang pendidikan sangatlah penting guna meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas agar sumber daya alam yang nyatanya sangat melimpah dapat dikelola dengan maksimal. Yang menjadi sorotan lainnya adalah sektor pariwisata, Indonesia memiliki potensi wisata yang sangat melimpah di berbagai penjuru daerah yang seharusnya bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan retribusi daerah, sehingga bisa memaksimalkan pendapatan daerah. Jika semua program dalam kebijakan ekonomi bisa terimplementasi dengan baik serta sasarannya tertuju dengan tepat tentu akan sedikit memberikan ruang bagi pelaku usaha kecil, sehingga harapan tentang keadilan sosial ekonomi masyarakat Indonesia bisa terwujudkan

sekaligus mengurangi stigma buruk terhadap pemerintahan yang ada.

Re-implementasi Sistem Ekonomi Pancasila

Melihat berbagai kebijakan pemerintah yang belum sepenuhnya menekankan keberpihakan ekonomi terhadap masyarakat luas menyiratkan perlu merekonstruksi kembali implementasi sistem ekonomi Pancasila dalam berbagai rumusan kebijakan yang akan diambil demi tercapainya tujuan negara untuk mensejahterakan warga negaranya melalui produk-produk kebijakan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Pengalaman pahit krisis moneter pada akhir perjalanan orde baru tahun 1998 membuat kita akhirnya membuka mata ternyata sangatlah penting arti dari kemandirian ekonomi yang harus dimiliki oleh negara kita. Kemandirian ekonomi tidaklah harus berlangsung cepat dan pesat, tetapi memang butuh proses walaupun secara bertahap dan tumbuh dengan laju yang tidak terlalu cepat namun dapat konsisten tumbuh dan terjaga keberlanjutannya dalam jangka Panjang. Ekonomi Pancasila didasarkan pada implementasi nilai-nilai Pancasila yang berbeda dengan nilai-nilai pada sistem ekonomi yang lain. Ekonomi Pancasila ini tidak menganut ilmu yang mengandung keserakahan manusia pada manusia atau

sumber daya yang ada, yang utama bukan mencari keuntungan ataupun memanfaatkan secara materialistik manusia lain dan sumber daya yang ada. Semua dibatasi pada moral dan etika, ekonomi Pancasila lebih berwajah kemanusiaan.

Pemerintah orde baru yang selalu mengatakan melaksanakan Pancasila dan UUD NRI 1945 secara murni dan konsekuen namun dalam praktiknya justru menerapkan sistem ekonomi yang cenderung liberal. Bung Hatta telah berulang kali mengkritik kebijakan ekonomi yang diambil oleh presiden Soeharto, menurut Bung Hatta dengan persaingan pasar bebas yang liberal akan selalu dimenangkan oleh pihak yang kuat modalnya atau konglomerat. Hal ini terbukti setelah berlangsungnya Orde Baru selama 32 tahun yang berakhir dengan krisis moneter, perekonomian semakin menjauh dari tujuan dan cita-cita negara dan meledak seperti bom waktu dengan diakhiri dengan lengsernya Orde Baru pada 1998.

Sejak kejadian Orde Baru ini akhirnya nama Ekonomi Pancasila menjadi tercemar di kalangan masyarakat karena dianggap merupakan warisan dari Orde Baru, padahal kedua hal tersebut jelas-jelas sesuatu yang sangat amat jauh berbeda. Penggunaan sistem ekonomi Pancasila pada masa Orde Baru sangat tidak murni,

karena nyatanya lebih condong pada ekonomi liberal. Nyatanya kegagalan pemerintahan masa orde baru bukan diakibatkan dari asas Pancasila yang digunakan, namun karena pelaksanaan dari asas Pancasila telah diselewengkan oleh pemegang kekuasaan saat itu, sehingga korupsi kolusi dan nepotisme merajalela dan menghancurkan sendi-sendi kehidupan pemerintah dan masyarakat.

Penggunaan Ekonomi Pancasila ini bukanlah sesuatu yang baru dan perlu mengubah total penggunaan sistem ekonomi yang telah digunakan negara kita selama ini. Sebenarnya sistem ekonomi Pancasila ini telah hidup dalam keseharian dan tradisi bangsa masyarakat Indonesia. Adapun alasan mengapa dalam praktiknya ekonomi Pancasila ini masih susah berkembang ialah karena banyaknya kepentingan politik dari para pembuat kebijakan dan elit politik yang memiliki kepentingan tersendiri bagi individu dan kelompok-kelompok tertentu serta telah terkontaminasinya mereka pada paham ekonomi liberal yang hanya akan menguntungkan segelintir orang. Krisis moneter 1998 telah berlalu, namun masih menyisakan paham-paham ekonomi liberal pada beberapa sisi pemerintahan. Meskipun keberpihakan pemerintah pada konglomerat belum hilang tetapi gerakan ekonomi kerakyatan yang dipicu semangat

reformasi memberikan iklim segar pada berkembangnya sistem ekonomi Pancasila yang berpihak pada ekonomi rakyat. Meskipun belum sepenuhnya dan belum secara merata pemerintah mengimplementasikan sistem ekonomi Pancasila, namun sudah mulai muncul beberapa kebijakan yang mengacu pada ekonomi kerakyatan seperti kredit usaha rakyat (KUR), usaha mikro kecil menengah (UMKM), badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS), dan lain sebagainya yang secara teori dan konsep sudah mengacu pada prinsip ekonomi Pancasila, hanya saja kembali pada prakteknya dilapangan yang terkadang masih dimanfaatkan oleh beberapa pihak sehingga tidak sesuai dengan tujuan utama dan cita-cita yang telah disusun dari konsep awal terbentuknya program tersebut. Hal ini akhirnya menyebabkan celah masuknya liberalis kapital global yang hanya menguntungkan pihak-pihak yang memiliki modal besar dan orang-orang kaya saja. Untuk itu perlu dilakukan koreksi ulang oleh pemerintah terkait bagaimana implementasi ekonomi Pancasila agar dapat dilaksanakan secara murni dan konsekuen untuk mencapai cita-cita dan tujuan berdirinya bangsa Indonesia yakni memakmurkan dan mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia.

KESIMPULAN

Ekonomi Pancasila atau sering disebut dengan istilah ekonomi kerakyatan ini berlandaskan pada ideologi Pancasila dan konstitusi negara UUD NRI 1945. Wujud nyata dari sistem ekonomi Pancasila ini sendiri ialah berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Bentuk konkrit dari ekonomi Pancasila ialah berbentuk koperasi dan berbagai Lembaga ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh masyarakat kebanyakan dengan cara swadaya untuk mengelola sumber daya ekonomi apa saja yang mungkin mampu dikuasai dan diusahakan, kegiatan ini seringkali disebut dengan usaha kecil mikro menengah atau disingkat dengan UMKM. Kegiatan yang biasanya dilakukan oleh pelaku ekonomi ini biasanya pada lingkup pertanian, peternakan, kerajinan, makanan dan lain sebagainya yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga tanpa harus mengorbankan kepentingan masyarakat lainnya. Eksistensi dari ekonomi Pancasila dapat terwujud dengan mengedepankan nilai moralitas, etika, kemanusiaan, kekeluargaan dan peran dari pelaku ekonomi sebagai mitra untuk menangkal arus kapitalisme global.

DAFTAR PUSTAKA

- Baswir, R. (2009). *Ekonomi Kerakyatan vs Neoliberalisme*. Yogyakarta: Tim Ahli Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gajah Mada.
- Kuncoro, M. (2001). Sistem Ekonomi Pancasila: Antara Mitos dan Realitas. Tinjauan buku Mubyarto Membangun Sistem Ekonomi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* Vol. 16, No. 1, 88– 96.
- Fadilah, N. (2019). Tantangan dan Penguatan Ideologi Pancasila Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0. *Journal Of Digital Education, Communication, And Arts (Deca)*, Vol. 2. No. 2, 66-78.
- Yustika, A. E. (2014). *Ekonomi Kelembagaan: Paradigma, Teori, dan Kebijakan*. Jakarta: Erlangga.
- Hosein, Z. A. (2016). Peran Negara dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Kerakyatan Menurut UUD 1945. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol.23 No.3, 503-528.
- Salim, A. (2019). *Ekonomi Pancasila Dan Implikasinya Dalam Pembelajaran Ekonomi*. Penkomi: Kajian Pendidikan Dan Ekonomi, Vol.2 No.1, 16-30.
- Kurniawan, I. D., & Lahir, S. (2017). Sistem Kapitalisme Negara Sebagai Alternatif Sistem Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Pancasila. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, Vol.1 No.2.
- Mubyarto. (2002). *Ekonomi Pancasila*. Yogyakarta: BPFE-UGM.
- Mubyarto. (1987). *Ekonomi Pancasila: Gagasan dan Kemungkinan*. Jakarta: LP3ES, Cet. Ke-1.
- Madjid & Swasono. (1988). *Wawasan Ekonomi Pancasila*. Jakarta: UI Press, Cet. Ke-1.
- Sumodiningrat G. (1999). *Sistem Ekonomi Pancasila dalam Perspektif*. Jakarta: IMPAC WAHANA CIPTA, Cet. Ke-1.
- Saputra, I., & Saoqillah, A. (2017). Koperasi Sebagai Soko Guru Penggerak Ekonomi Pancasila. *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, Vol.2 No.2, 139-146.
- Dawam Rahardjo. (2001). *Ekonomi-Politik Transisi ke Demokrasi di Indonesia*. *Jurnal Reformasi Ekonomi*, Vol. 2 No.1, Januari-April.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Swasono, S. E. (2012). Meluruskan Penyelewengan Mandat Konstitusi Pancasila Nasionalisme Pasal 33 UUD 1945 Menolak Neoliberalisme, Makalah untuk kuliah umum di Universitas Negeri Malang, 4 Juli 2012.
- Mubyarto. (1995). *Pemikiran Pembangunan Bung Hatta*. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Harahap, N. (2014). *Penelitian Kepustakaan*. *Jurnal Iqra*, Vol. 8 No.1, 68-74.
- Wibisono, Dermawan. 2003. *Riset Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.